

**KETIMPANGAN SOSIAL DALAM PENEGAKAN PROTOKOL
KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAWA
TENGAH****Fitria Lisdayani**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sheila Selvia Putri

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Deris Desmawan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi penulis: 5553210013@untirta.ac.id

Abstract. *Social inequality is an annual problem that occurs in developing countries such as Indonesia. The existence of this gap is influenced by several factors, including public unpreparedness for the pandemic, government policies, and the impact of globalization. This gap can lead to social jealousy which has an impact on people's lives, dropping out of school, etc. Social inequality is closely related to poverty. Poverty itself is a problem that seems to have existed in the past, but various efforts have been made to overcome it. The Covid-19 pandemic has put additional pressure on the country's economy, especially its small population, as all activities have been severely restricted for the past two years. The dwarves lamented more and more about the lack of job opportunities, and it became difficult to find a bite of rice for them. Article 34 paragraph (2) of the 1945 Constitution stipulates that the state implements a social security system for all people and strengthens the vulnerable and blessed people in accordance with human dignity. Surprisingly, many officials have seen an increase in assets during the pandemic. This is ironic, considering that people have difficulty finding rupiah coffins, but the fortunes of officials have actually increased.*

Keywords: *Social Inequality and Poverty, Covid-19*

Abstrak. Ketimpangan sosial adalah perkara tahunan yang ada pada negara berkembang misalnya Indonesia. Adanya kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksiapan masyarakat terhadap pandemi, kebijakan pemerintah, dan dampak globalisasi. Kesenjangan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat, putus sekolah dll. Ketimpangan sosial erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang seolah-olah sudah ada di masa lalu, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan tambahan pada perekonomian negara, terutama populasinya yang kecil, karena semua kegiatan telah sangat dibatasi selama dua tahun terakhir. Para kurcaci semakin menyesali kurangnya kesempatan kerja, dan menjadi sulit untuk menemukan sesuap nasi untuk mereka. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperkuat masyarakat yang rentan dan diberkati sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anehnya, banyak pejabat telah melihat peningkatan aset

selama pandemi. Hal ini ironis, mengingat masyarakat kesulitan mencari peti mati rupiah, namun rejeki pejabat justru meningkat.

Kata Kunci : *Ketimpangan dan Kemiskinan, Covid-19*

PENDAHULUAN

Wabah *COVID-19* tergolong bencana non alam yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi lokal. Di daerah suku terpencil mereka menghadapi kemiskinan dan kekurangan Makanan (Niko, 2021). Hal ini juga terjadi pada semua daerah Indonesia termasuk Kalimantan Barat. Orang yang rentan terhadap infeksi epidemi penyakit *coronavirus-19 (Covid-19)*. terhadap kejadian di Di wilayah Kalimantan Barat, tren epidemi terus meningkat dan meningkat pesat Semua kabupaten/kota. Apa yang terjadi di wilayah kota Pontianak yang menjadi pusat siaran Arus masuk dari negara bagian lain melalui udara masih berlangsung.

Pandemi ini mempengaruhi semua komunitas di seluruh dunia, tanpa memandang kelas atas. Masyarakat kelas menengah ke bawah (Carr, 2020). Efek serupa di Kota Pontianak Pandemi ini di segala bidang. Jalur ekonomi, budaya dan lainnya. Wabah ini telah menyebar jauh dan luas sosial budaya, ekonomi dan bahkan lingkungan (McNeely, 2021). Pandemi *Covid-19* ini tidak hanya berdampak dalam sektor swasta, tetapi juga tingkat keparahan pekerja dan kemiskinan Meningkatnya kemiskinan (Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020) dan dampaknya terhadap masyarakat miskin Masyarakat adat terancam kemiskinan dan menghadapi kelaparan. *Coronavirus (Corona Virus Disease-2019, disingkat Covid-19)* telah menjadi pandemi global. Distribusinya sangat besar di seluruh dunia (Organisasi Kesehatan Dunia [WHO]). Bisnis Indonesia masih menghadapi kehadiran virus ini, yang membuat infeksi lebih ganas. varian virus baru. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia meningkat secara signifikan dari hari ke hari (Gugus Tugas Penanganan *Covid-19*, 2021).

Krisis kesehatan yang luar biasa ini membutuhkan tindakan dan tindakan segera untuk melindungi populasi yang rentan dan mempersiapkan strategi pemulihan jangka panjang (berkelanjutan) (Bank Dunia, 2020). Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam negeri termasuk Pembatasan Sosial Massal (PSBB) untuk menekan penyebaran virus *Covid-19*. Di wilayah Kota Pontianak, kebijakan PSBB terbaru diatur dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi. Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 7 Tahun 2021 Nomor 110 Tahun 2021 Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Disiplin dan Penuntutan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Virus *Corona* Tahun 2019 Tentang Pembedulan.

Masyarakat adalah sistem struktur sosial yang paling kompleks. masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam membangun peradaban manusia. Menurut Talcott Parsons, masyarakat Ada institusi yang saling terkait dan saling bergantung. semua institusi Komunitas melakukan tugas-tugas khusus untuk stabilitas dan

pertumbuhan komunitas (Mustafa, 2008). Maka dalam hal ini diperlukan pedoman untuk menyatukan kelompok/komunitas agar ada keteraturan. Stabil.

Masyarakat beradaptasi sebagai sebuah sistem di tengah pandemi Covid-19 saat ini kebijakan protokol kesehatan yang membangun tujuan bersama untuk mengekang penyebaran virus, Penggunaan masker akan berlanjut selamanya sebagai rasa persatuan sosial dan biaya pemeliharaan Pelaksanaan Protokol Kesehatan (Kuntardi, 2021). Namun, itu sebenarnya mungkin Penegakan regulasi di bidang ini masih lemah, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia. Kota Ambon tanpa efek jera terhadap pelanggaran (Adam, Supusepa, Hattu, & Taufik, 2021).

Kebijakan PSBB diatur secara nasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Republik Indonesia. 2020 sehubungan dengan pembatasan sosial berskala besar yang mempercepat respons terhadap COVID-19 Penyakit 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut secara operasional dijelaskan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 Pedoman pengendalian diri sosial skala besar yang menyertai akselerasi Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Nantinya, SK Gubernur Provinsi Kalbar Nomor 110 Tahun 2020 menjadi dasar pelaksanaannya Kebijakan PSBB di Kota Pontianak dan Provinsi dan Kota Lainnya (Pergub No. 149 Tahun 2020, Pergub No. 149) 110, 2020; Perintah Eksekutif No. 149 Tahun 2020). Dalam implementasinya, pengetatan PSBB hanya akan terjadi di perkotaan saja Pontianak, daerah lain menerapkan skala mikro. Pusat infeksi Covid-19 ada di Indonesia Kota Pontianak merupakan kawasan terlarang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kami menemukan bahwa penerapan pedoman protokol kesehatan tertunda Tidak seperti yang diharapkan ketika penerapan protokol kesehatan berlaku untuk sholat berjamaah di rumah-rumah ibadah Di masa pandemi *Covid-19* masih belum optimal (Aziz, Wardhani, & Junaedi, 2021). kurangnya kesadaran. Hal ini juga menjadi kendala dalam penegakan disiplin Undang-Undang Protokol Kesehatan di masa mendatang. Dampak pandemi ini (Lystianingrum & Philona, 2021). Situasi ini bisa memicu lonjakan kasus positif *Covid-19* karena ketidaktahuan sebagian orang.

Secara umum aspek-aspek implementasi kebijakan PSBB berikut ini perlu mendapat perhatian lebih: Masyarakat sebagai kelompok sasaran, termasuk penyediaan pendidikan berkelanjutan Memahami Manfaat Kebijakan PSBB Bagi Warga Negara (Herdiana, 2020). dalam Dalam implementasinya, terdapat kesenjangan mata pencaharian masyarakat ekonomi menengah atas dan menengah bawah yang membuat aturan tersebut. PSBB kurang efektif karena masyarakat miskin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Nasruddin & Haq, 2020), sehingga kepatuhan terhadap peraturan ini terpusat dan tidak konsisten di beberapa daerah Karena kompleksitas masyarakat kita yang beragam.

Pada dasarnya, situasi masyarakat Indonesia sangat rumit karena memiliki berbagai budaya dan budaya. Setiap kelompok memiliki keunikannya masing-masing. Situasi ini memiliki konsekuensi yang sangat serius Pelaksanaan hukum di masyarakat

khususnya dalam bidang penegakan hukum (Rahardjo, 2007). Hal ini menyebabkan lahirnya undang-undang yang diskriminatif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan Hukum tidak berjalan dengan baik, hal ini berkaitan dengan faktor hukum, faktor penegakan Faktor Hukum, Kelembagaan atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya (Doly, 2021). Namun, ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang disukai, Serta kelompok-kelompok tertentu ditempatkan di bawahnya. fakta adalah fakta Struktur diskriminatif di mana diskriminasi terjadi antar kelompok tetapi tidak di dalam setiap kelompok-kelompok (Rahardjo, 2007).

Marx dan Engels, bebas dan budak, mulia dan umum, Warga negara, tuan dan budak, guildmaster dan pengangguran, yaitu penindas Orang-orang yang tertindas berada dalam konfrontasi terus-menerus dan memiliki semangat perlawanan. terkadang tersembunyi, terkadang terungkap, setiap kali berakhir dalam bentuk rekonstruksi revolusioner sosial pada umumnya, atau penghancuran kelas yang berlawanan (Turner & Giddens, 2008). Menunjukkan klasifikasi kelas. Mereka yang berkuasa dan yang tertindas kemudian dalam struktur Ada diskriminasi dalam kekuasaan. Ketimpangan sosial ini juga terjadi dalam penegakan aturan protokol kesehatan di berbagai wilayah Indonesia (Aziz et al., 2021; Herdiana, 2020; Nasruddin & Haq, 2020).

Pada tataran makro dan mikro, keberadaan hukum sebagai sarana perancangan dianggap Tatahan dan ketertiban sosial. Pada intinya, hukum menitikberatkan pada prosedur. Artinya, untuk melihat dan mengevaluasi masyarakat dan perilaku masyarakat dari perspektif itu. Disusun dalam sistem yang konsisten secara logis. semua orang sangat menginginkannya Tercapainya syarat-syarat tertentu, yaitu ketertiban (Rahardjo, 2007). Namun, program sejauh ini Hanya ada pengutamaan pihak-pihak tertentu dalam masyarakat, tidak ada pengutamaan subjek program (Niko & Yulasteriyani, 2020).

Di satu tingkat, ketertiban dan ketertiban itu sendiri adalah hal yang sangat sulit. Karena masih ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan masih terkesan selektif dan terstruktur. kekuatan lapisan tertentu. Di tingkat mikro, implementasi pedoman hukum Perintah dapat diimplementasikan dengan baik, tetapi sangat sulit di level makro tercapai. Hal ini juga dicapai dengan kebijakan karantina kesehatan kita selama pandemi Covid-19. Terwujudnya ketertiban masyarakat dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Kertas ini Mendemonstrasikan bagaimana ketimpangan sosial terjadi dalam penerapan kebijakan protokol kesehatan PSBB di perkotaan. Pontianak mempengaruhi terciptanya ketertiban dan keteraturan sosial.

KAJIAN TEORITIS

Ketimpangan diyakini telah muncul selama pandemi COVID-19. Hal ini karena kelompok masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sementara itu, kelompok orang lain berpenghasilan lebih rendah. Ada kemungkinan sebagian orang menambah penghasilannya karena mampu beradaptasi dengan situasi di masa pandemi. B. Mencari peluang inovasi, aktivitas ekonomi dan aktivitas online. Area bisnis yang sangat sukses adalah pengaturan akomodasi dan makan. Segmen bisnis tumbuh 21,58%, jauh di atas total tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%

pada Q2 2021 dibandingkan dengan Q2 2020. Sektor-sektor usaha yang berkembang sangat baik di masa pandemi diyakini berpotensi mendongkrak pendapatan bagi karyawan maupun pengusaha. Sayangnya, tidak semua sektor usaha berkembang secara optimal. B. Insentif dan Dukungan Usaha. Di sisi lain, sektor usaha yang tidak tumbuh optimal atau di bawah laju pertumbuhan nasional (7,07%) adalah pertanian (0,38%), konstruksi (4,42%), manufaktur (6,58%), dan telekomunikasi (6,87%).) .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Terutama dalam kesenjangan sosial di masyarakat. Penelitian ini yang memanfaatkan survei kepustakaan, proses pengumpulan datanya tidak memerlukan terjun langsung ke lapangan, tetapi menggunakan berbagai sumber referensi untuk mendukung penelitian ini. Survei ini merupakan jenis survei kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan untuk analisis data melalui organisasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data menggunakan triangulasi sumber data untuk memahami garis besar kesimpulan dari penelitian literatur yang dikembangkan dalam penelitian ini Mendengarkan dan mencatat informasi penting dalam tubuh manusia (Putra dan Dana, 2016). Studi selanjutnya harus mencakup populasi dan geografi yang lebih luas. Hasil dapat diperhitungkan karena dapat berbeda bila diterapkan pada bidang yang berbeda (Damayanti dan Wirasedana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan telah menjadi masalah yang luar biasa sepanjang sejarah. Karena Indonesia belum memiliki strategi atau kebijakan dalam pemerintahan, maka program penanggulangan kemiskinan yang tepat adalah program pemberdayaan masyarakat yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin. dan kondisi lokal mereka. Misalnya, kita tidak bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memberikan kesempatan kerja sehingga masalah tidak dapat diselesaikan.

BPS menggunakan konsep kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. (Pendekatan Kebutuhan Dasar) Mengukur kemiskinan. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai hambatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan dalam hal pengeluaran. Rata-rata, orang miskin menghabiskan di bawah garis kemiskinan per orang per bulan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menghitung indeks penduduk, atau proporsi penduduk miskin. Jumlah penduduk.

Pandemi *COVID-19* mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan, jalur sosial, ekonomi, politik, budaya, pemerintahan hingga agama. Pandemi juga berdampak pada mobilitas ekonomi dan sosial warga global. Termasuk Indonesia. Akibatnya, perekonomian runtuh. kemiskinan, pengangguran, Ketimpangan sosial menjadi semakin nyata terlihat. Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu wilayah Indonesia dengan kepadatan penduduk nomor 5 terbesar di Indonesia. Sehingga banyak terjadinya kemiskinan dan ketimpangan pada penduduknya. Saat ini, Pandemi telah secara

signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan. sementara itu Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pandemi COVID-19 di Jawa Tengah jumlah penduduk miskin. Kesimpulan berdasarkan data mengenai garis kemiskinan provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa:

1. Secara keseluruhan provinsi Jawa Tengah memiliki besar garis kemiskinan yang menaik setiap tahun selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2021, pada tahun 2017 garis kemiskinannya berada di angka 333224.00, kemudian naik lagi di tahun 2018 sebesar 350875.00, di tahun 2019 sebesar 369385.00, tahun 2020 sebesar 395407.00, dan puncaknya di tahun 2021 sebesar 409193.00. dapat dilihat dari tahun 2017-2021 angka kenaikan garis Kemiskinan di Jawa Tengah meningkat pesat.
2. Kabupaten Cilacap: Dari data diatas angka garis kemiskinan kabupaten cilacap provinsi Jawa Tengah dalam kurun 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2017-2021 memiliki angka garis tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2017 307041.00 dan memiliki angka garis kemiskinan tinggi pada tahun 2021 sebesar 363367.00 (naik).
3. Kabupaten Banyumas: Dari data di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan garis kemiskinan yang rendah sebesar 357748,00 pada tahun 2017 dan garis kemiskinan yang tinggi sebesar 417086,00 pada tahun 2021.
4. Kabupaten Purbalingga: Dari data di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan garis kemiskinan yang rendah sebesar 313343,00 pada tahun 2017 dan garis kemiskinan yang tinggi sebesar 384183,00 pada tahun 2021.
5. Kabupaten Banjarnegara: Dari data di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2021, menunjukkan garis kemiskinan yang rendah sebesar 264387,00 pada tahun 2017 dan garis kemiskinan yang tinggi sebesar 328679,00 pada tahun 2021
6. Kabupaten Kebumen: Dari data di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan garis kemiskinan yang rendah sebesar 325819,00 pada tahun 2017 dan garis kemiskinan yang tinggi sebesar 390599,00 pada tahun 2021.
7. Kabupaten Purworejo: Dari data di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2021, menunjukkan garis kemiskinan yang rendah sebesar 325871,00 pada tahun 2017 dan garis kemiskinan yang tinggi sebesar 376127,00 pada tahun 2021.

8. Kabupaten Wonosobo: Dari data di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan garis kemiskinan yang rendah sebesar 308553,00 pada tahun 2017 dan garis kemiskinan yang tinggi sebesar 373474,00 pada tahun 2021.
9. Kabupaten Magelang: Dari data di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 281237,00 untuk garis kemiskinan rendah pada tahun 2017 dan 353608.00 untuk garis kemiskinan tinggi pada tahun 2021.
10. Kabupaten Boyolali: Dari data di atas, garis kemiskinan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memiliki angka kemiskinan terendah pada tahun 2017 sebesar 293405,00 dan angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 361922,00 dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2021.
11. Kabupaten Klaten: Dari data diatas angka garis kemiskinan kabupaten banyumas provinsi jawa tengah dalam kurun 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2017-2021 memiliki angka garis kemiskinan tahun 2017 rendah sebesar 376305.00 angka garis kemiskinan tinggi pada tahun 2021 sebesar 436896.00 (naik).

Dari 30 data provinsi/kabupaten di jawa tengah dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2017-2021 angka garis kemiskinnannya terus menaik secara signifikan di tahun terakhir 2021. Oleh karena itu, masalah ini perlu disikapi dengan hati-hati oleh pemerintah daerah dan pusat. Dalam intervensinya agar garis kemiskinan di provinsi jawa tengah tidak terus naik. Begitupun di provinsi lain Indonesia.

Kondisi pandemi yang menyebabkan kontraksi perekonomian di beberapa sektor menyebabkan beberapa perusahaan memangkas pekerjanya yang merupakan warga sipil atau masyarakat. Kondisi PHK ini menyebabkan penghasilan masyarakat menurun namun harus dihadapkan dengan pemenuhan k Pandemi covid-19, Membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kebangkitan prasangka ini juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kecemburuan sosial. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. pejabat tinggi Negara yang kekayaannya meningkat drastis, belum lagi negara yang meledak 1.000% harus menjelaskan kepada publik bagaimana kekayaan akan meningkat. Kesenjangan antara kaya dan miskin adalah fakta mikroskopis bahwa distribusi kekayaan adalah mungkin Lebih banyak perhatian perlu diberikan pada distribusi pendapatan (Waluyo,2009). Potret kemiskinan menjadi sangat kontras. Orang hidup dalam kelimpahan, beberapa orang hidup dalam kelimpahan cacat. Kekayaan bagi satu orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Pandemi pada Indonesia yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini membawa poly perubahan krusial melalui pandemi *COVID-19*. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Akibat Pandemi Menyerang kesehatan fisik orang dan mendorong perkembangan Sektor ekonomi dan sosial juga terbatas. Akibat merosotnya sistem sosial Ekonomi pada akhirnya meningkatkan nilai kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial semakin jelas dan nyata (Rosyadi, 2021). Kita

butuh pengentasan kemiskinan. Tetapi Pengentasan kemiskinan tidak selalu terjadi ketimpangan. Meski begitu intervensi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan social terutama di tengah pandemic covid-19 sangat di perlukan. Maka dari itu Kunci utama upaya mengatasi ketimpangan sosial ekonomi adalah memberikan akses kepada semua masyarakat untuk menggunakan fasilitas sosial yang ada dan Memberikan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Ketimpangan sosial terjadi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga pendidikan, teknologi, kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Kesenjangan sosial yang terkait dengan pendidikan seharusnya dapat diminimalisir Bahkan menyelesaikannya agar tidak menjadi perselisihan yang berlarut-larut dalam Masyarakat (Hidayat, 2018). Representasi yang berbeda dari pengetahuan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, tindakan yang berbeda di dunia. Pada saat yang sama, pengetahuan tergantung dalam praktik sosial mereka dibangun bersama dari interaksi manusiaDunia (Pertiwi, 2019). Ada banyak masalah pendidikan di negara ini. Ada beberapa hal dalam menghadapi setidaknya sembilan masalah. Yakni 1) Masalah banyaknya anak yang tidak bisa sekolah; 2) Masalah besar adalah putus sekolah; 3) Masalah ketidakseimbangan horizontal dan vertical; 4) Masalah staf; 5) Kurikulum dan Masalah Pengajaran yang Kedaluwarsa; 6) Masalah sumbangan pendidikan; 7) Soal Ujian Nasional Intensif; 8) Masalah bottleneck dari mekanisme inspeksi dan pemantauan; 9) Masalah tidak terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan

Tabel 1.2 Gini Rasio di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017

Kabupaten / Kota	Gini Rasio				
	2015	2014	2013	2012	2011
PROVINSI JAWA TENGAH	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38
Kabupaten Cilacap	0.34	0.34	0.37	0.32	0.3
Kabupaten Banyumas	0.32	0.32	0.36	0.34	0.35
Kabupaten Purbalingga	0.3	0.3	0.32	0.33	0.28
Kabupaten Banjarnegara	0.34	0.34	0.39	0.33	0.36
Kabupaten Kebumen	0.28	0.28	0.31	0.35	0.34
Kabupaten Purworejo	0.38	0.38	0.34	0.31	0.36
Kabupaten Wonosobo	0.35	0.35	0.34	0.38	0.35
Kabupaten Magelang	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32
Kabupaten Boyolali	0.3	0.3	0.4	0.38	0.36
Kabupaten Klaten	0.36	0.36	0.34	0.33	0.32
Kabupaten Sukoharjo	0.35	0.35	0.34	0.35	0.33
Kabupaten Wonogiri	0.33	0.33	0.34	0.32	0.35
Kabupaten Karanganyar	0.36	0.36	0.33	0.4	0.37
Kabupaten Sragen	0.33	0.33	0.35	0.37	0.35
Kabupaten Grobogan	0.34	0.34	0.34	0.35	0.32

Kabupaten Blora	0.39	0.39	0.41	0.38	0.33
Kabupaten Rembang	0.33	0.33	0.32	0.33	0.27
Kabupaten Pati	0.31	0.31	0.3	0.29	0.29
Kabupaten Kudus	0.37	0.37	0.34	0.34	0.35
Kabupaten Jepara	0.31	0.31	0.33	0.35	0.32
Kabupaten Demak	0.32	0.32	0.33	0.34	0.31
Kabupaten Semarang	0.31	0.31	0.31	0.36	0.33
Kabupaten Temanggung	0.38	0.38	0.34	0.35	0.38
Kabupaten Kendal	0.34	0.34	0.32	0.36	0.37
Kabupaten Batang	0.29	0.29	0.3	0.31	0.28
Kabupaten Pekalongan	0.29	0.29	0.27	0.28	0.28
Kabupaten Pemalang	0.28	0.28	0.24	0.25	0.26
Kabupaten Tegal	0.33	0.33	0.32	0.32	0.28
Kabupaten Brebes	0.32	0.32	0.31	0.32	0.33
Kota Magelang	0.36	0.36	0.33	0.37	0.34
Kota Surakarta	0.36	0.36	0.35	0.37	0.33
Kota Salatiga	0.35	0.35	0.37	0.35	0.34
Kota Semarang	0.31	0.31	0.35	0.35	0.35
Kota Pekalongan	0.34	0.34	0.32	0.33	0.31
Kota Tegal	0.31	0.31	0.32	0.33	0.32

Tabel 1.2 menunjukkan Gini ratio Jawa Tengah tahun 2011 sebesar 0,38%, sedangkan Gini ratio Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 0,38% tidak ada kenaikan ataupun penurunan sehingga hasilnya tetap dengan tahun 2011 yaitu berjumlah 0,38% , pada tahun 2013 Gini Rasio Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan 1% menjadi berjumlah 0,39% , pada tahun 2014 Gini Rasio Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan 1% menjadi berjumlah 0,38% kembali, dan pada tahun 2015 Gini Rasio Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan sehingga hasilnya tetap dengan tahun sebelumnya menjadi berjumlah 0,38%.

Dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Pemalang tahun 2011 paling rendah dari kabupaten lainnya yaitu berjumlah 0,26% ,di atas Kabupaten Pemalang ada Kabupaten Rembang berjumlah 0,27% , dan untuk tingkat ke-3 paling rendah yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Tegal berjumlah 0,28%. Untuk tahun 2012 Kabupaten Gini Rasio paling rendah yaitu Kabupaten Pemalang 0,25%, peringkat ke-2 paling rendah yaitu Kabupaten Pekalongan 0,28% , dan peringkat ke-3 yaitu Kabupaten Pati 0,29%. Untuk tahun 2013 Kabupaten Gini Rasio paling rendah yaitu Kabupaten Pemalang 0,24%, peringkat ke-2 paling rendah yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Batang 0,30% , dan peringkat ke-3 yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Brebes 0,31%.

Untuk tahun 2014 Kabupaten Gini Rasio paling rendah yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pemalang 0,28%, peringkat ke-2 paling rendah yaitu

Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan 0,29% , dan peringkat ke-3 yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Boyolali 0,30%.

Untuk tahun 2015 Kabupaten Gini Rasio paling rendah yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pemalang 0,28%, peringkat ke-2 paling rendah yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan 0,29% , dan peringkat ke-3 yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Boyolali 0,30%.

Pandemi yang disebabkan oleh *Virus Corona* menyebabkan penurunan pada aktivitas perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, hal ini menguntungkan sebagian pihak, pejabat negara dengan menggunakan wewenangnya menjalankan bisnisnya sehingga menjamur maupun merambat bidang tertentu yang mungkin saja memberikan nilai laba yang besar dengan menyediakan kebutuhan darurat, misalnya bisnis masker, PCR, Vaksinasi, dan lain-lain yang dijual ke masyarakat. Kondisi ini menjadikan sebagian pihak mendapat keuntungan yang besar.

Ada berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat : perubahan bertahap dan perubahan cepat. a) Perubahan lambat adalah perubahan jangka panjang yang terjadi secara perlahan dalam urutan kecil dan terjadi secara alami. Hal ini terjadi karena adanya upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Perubahan yang cepat adalah perubahan yang terjadi pada fondasi atau sendi fundamental (lembaga sosial) kehidupan masyarakat, dan perubahan tersebut biasanya terjadi karena direncanakan. b). Perubahan Kecil vs. Besar Perubahan kecil tidak berdampak langsung atau signifikan terhadap masyarakat, tetapi perubahan besar memiliki efek sebaliknya. c). Perubahan yang diinginkan (direncanakan) dan tidak diinginkan (tidak direncanakan) (Imran, 2015).

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji sejauh mana kemiskinan dan ketimpangan mempengaruhi rasio Gini di Jawa Barat, penelitian ini mengganti variabel bebas (kemiskinan dan ketimpangan) dengan variabel terikat (rasio Gini). Uji ini dapat dikonfirmasi dari statistik regresi t apa pun dengan menggunakan tabel t ketika hipotesis ditolak dan diterima. Uji regresi linier berganda dilakukan dengan SPSS versi 24. Berdasarkan hasil ini, kami memperoleh rumus berikut:

$$Y = 0,342 + (-2,092E-8)$$

Persamaan regresi menyumbang konstanta dengan nilai 0,342. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kemiskinan dan ketimpangan konstan (constant), maka nilai ketimpangannya adalah 0,342. Koefisien regresi untuk variabel kemiskinan dan ketimpangan adalah -2.092E-8 dan semakin meningkat.

Tabel 1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.342	.015		22.522	.000		
Kemiskinan	-2.092E-8	.000	-.039	-.527	.599	1.000	1.000

a. Dependent Variable: GiniRatio

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

T Hitung $-0,527 < 1,973381$ T Tabel, H_1 ditolak dan H_0 diterima, dan nilai “Sig” $< 0,05$ (Alpa) maka data tersebut tidak signifikan. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kemiskinan dan Ketimpangan.

$H_0 : \beta_2 = 0$ terdapat pengaruh variabel Kemiskinan dan Ketimpangan terhadap Gini Ratio

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ tidak terdapat pengaruh variabel Kemiskinan dan Ketimpangan terhadap Gini Ratio.

Hasil uji hipotesis menggunakan SPSS Statistics 24 adalah $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($-2,092E-8 < 0,599$) berdasarkan pengujian hipotesis dan menerima H_0 . Dalam beberapa kasus, ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel (kemiskinan dan ketimpangan) terhadap variabel dependen (rasio Gini). Oleh karena itu, dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel (kemiskinan dan ketimpangan) secara parsial mempengaruhi variabel terikat (rasio Gini) di Jawa Tengah.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 1.4 Uji F ANOVA

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.000	1	.000	.278	.599 ^b
Residual	.170	178	.001		
Total	.170	179			

a. Dependent Variable: GiniRatio

b. Predictors: (Constant), Kemiskinan

F hitung $0,278 > 253,5983$ F Tabel, H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan nilai “Sig” $< 0,05$ (Alpa) maka data tersebut tidak signifikan. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kemiskinan dan Ketimpangan

Uji Korelasi

Tabel 1.5 Uji Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.039 ^a	.002	-.004		.03088	.823

a. Predictors: (Constant), Kemiskinan

b. Dependent Variable: GiniRatio

“Terdapat hubungan sebesar 0,39 % antara variabel X (Kemiskinan dan Ketimpangan) terhadap variabel Y (Gini Ratio)”

Koefisien Determinasi (R²)

“Terdapat pengaruh sebesar 0,0002% antara variabel X (Kemiskinan dan Ketimpangan) terhadap variabel Y (Gini Ratio) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada persamaan model regresi”

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan mengenai informasi di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial dan Kemiskinan di Jawa Tengah sudah mengalami masalah kemiskinan yang signifikan, ditambah adanya wabah pandemi covid-19 membuat keadaan ekonomi pemerintah dan masyarakat semakin memburuk. Penerapan hukum serta adanya disparitas pelayanan dari Pendidikan, kesehatan serta teknologi membuat penertiban pada wilayah makro menjadi terhambat. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan sikap pemerintah dalam mengatasi masalah ini serta keselarasan masyarakat dalam melaksanakan ketertiban serta hukum agar dapat di terapkan semestinya.

Berdasarkan pengolahan dan analisis data uji signifikansi parameter individual (uji-t), Thitung < 1. Ttabel (-2,092E-8 < 0,599) Hasil pengujian hipotesis H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel (kemiskinan dan ketimpangan) terhadap variabel terikat (Gini rasio). Oleh karena itu, dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel (kemiskinan dan ketimpangan) secara parsial mempengaruhi variabel terikat (rasio Gini) di Jawa Tengah.

Berdasarkan uji signifikansi uji simultan (uji F) F hitung 0,278 > 253,5983 F Tabel, H0 diterima dan H1 ditolak, sig < 0,05 data tersebut tidak signifikan. Sehingga antara variable kemiskinan dan ketimpangan tidak berpengaruh. Kontribusi kemiskinan dan ketimpangan (variable x) pada gini ratio (variable y) adalah sebesar 0,39% sedangkan sisanya 0,0002% hasil dari variable lain yang tidak diketahui.

Pemerintah seharusnya dapat mengatasi masalah kemiskinan agar tingkat kemiskinan tidak terus bertambah setiap tahunnya di provinsi Jawa Tengah, pemerintah perlu evaluasi mendalam terkait masalah yang ada agar tidak terjadi disparitas pelayanan dari pendidikan, kesehatan serta teknologi. Pemerintah juga dapat melakukan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial. Selain

itu, pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, R. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6(1), 42–53. <https://doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3747>
- Andiaskiton, M. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*. <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal/index.php/JMBA/article/view/37%0Ahttp://stmb-multismart.ac.id/ejournal/index.php/JMBA/article/download/37/33>
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Irawan, A. D., & Sulistyono, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial. *Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262.
- Jambi, P. (2020). *Citra ekonomi*. 2, 28–38.
- Kumalasari, M. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. *Eprints Universitas Diponegoro Semarang*, 299.
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Anak. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4, 1–11. <https://spektrumonline.com/2020/11/11/dampak-pandemi-covid-19-multidimensi/>
- Syaputra, R. (2021). Universitas Bung Hatta. *Sumatera, Jl Karang, Ulak Utara, Padang Syaputra, Riki*, 6–7. <http://repo.bunghatta.ac.id/3293/3/36> ARIF MURANDA 1510017411019 BAB I.pdf
- Tarigan, P. B. (2014). Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). http://eprints.undip.ac.id/44692/1/11_HARAHAP.pdf
- Yuliani, M. (2013). Ketimpangan Pendidikan di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 53(9), 1689–1699.